

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara yang menerapkan sistem demokrasi memiliki keunggulan tersendiri karena setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada aspirasi masyarakat. Dalam sistem ini, masyarakat memegang peranan utama dan memiliki tanggung jawab besar. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam demokrasi adalah partisipasi dalam politik, salah satunya melalui pemilu.¹ Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Melalui pemilu, peran masyarakat sangat signifikan dalam menentukan siapa yang akan menduduki posisi eksekutif dan legislatif, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.² Pemilu dan demokrasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan karena pemilu akan mempengaruhi legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan.³

Pelaksanaan pemilu senantiasa disertai dengan berbagai fenomena serta permasalahan atau persoalan yang muncul dalam prosesnya. Di antara fenomena-fenomena pemilu, salah satu hal yang selalu menjadi *focal point* adalah partisipasi

¹ M Ulfatul Jafar, Ayatullah Hadi, and Kurniawan Cahyadi, 2024, "Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Desa Labuhan Aji Dalam Pemberian Suara Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8 no. 1: 62–71.

² *Ibid.*

³ Daud M Liando, 2016, "Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 3 no. 2: 14–28.

pemilih. Partisipasi pemilih sudah tentu menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan atau kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut juga disampaikan oleh Aidinil Zetra pada saat mengisi acara *Focus Group Discussion* Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Padang.⁴

Partisipasi pemilih merupakan bentuk dari partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan orang mau ikut dan tidak mau ikut dalam proses politik. Faktor tersebut diantaranya mulai dari status sosial ekonomi yang mana menurut Conway, sejumlah penelitian telah mengungkapkan bahwa individu yang mempunyai tingkat pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan yang lebih bagus umumnya lebih berpartisipasi dibanding individu yang tidak berpendidikan, berpenghasilan rendah, dan pekerjaan kasar.⁵ Faktor selanjutnya menurut Paige dan Ramlan Surbakti kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintahan,⁶ serta politik uang menurut James Coleman.⁷ Faktor terakhir adalah situasi, situasi yang dimaksud adalah seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman. Salah satu yang bisa dijadikan contoh dari faktor situasi adalah pandemi Covid-19.⁸

⁴ Iwan Setiawan, 2024, "Focus Group Discussion: Evaluasi Pemilihan Umum 2024," <https://www.rri.co.id/padang/pemilu/626215/kpu-padang-gelar-focus-group-discussion>. Diakses pada 21 Januari 2025

⁵ M Margaret Conway, 1985, *Participation In The United States*, (Washington: Congressional Quarterly Press) 19-24

⁶ Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo).

⁷ Coleman James, 2011, *Dasar-Dasar Teori Sosial*, (Bandung: Nusa Media) 37-38

⁸ Hertanto dkk, 2021, *Pilkada Di Masa Pandemi: Tantangan dan Harapan Dari Beragam Perspektif*, (Bandar Lampung: Aura), 200

Perilaku tidak memilih atau disebut sebagai golput merupakan sebuah perilaku seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, atau bisa disebut bahwa sekelompok orang yang tidak mau memilih salah satu partai peserta pemilu. Menurut Komisi Pemilihan Umum, penyebab seseorang memilih untuk menjadi golput adalah masyarakat merasa tidak ada kandidat legislatif yang cukup baik untuk mewakili masyarakat. Penyebab selanjutnya adalah karena masalah teknis, seperti tidak terdaftar sebagai pemilih dan tempat tinggal yang jauh dari tempat pemungutan suara. Penyebab terakhir adalah karena masyarakat yang sudah apatis.⁹

Perilaku tidak memilih tergolong ke dalam tiga kategori utama, yaitu karena teknis, politis, dan ideologis. Secara teknis, pemilih bisa saja absen dari TPS karena kondisi fisik seperti kelelahan, sakit, atau urusan mendesak seperti mengurus jenazah, serta kendala administratif seperti tidak terdaftar atau tidak menerima undangan memilih. Selain itu, rendahnya pengetahuan tentang proses pemilu atau kegagalan sosialisasi juga bisa menyebabkan kesalahan saat mencoblos atau ketidakhadiran. Dari sisi politis, sebagian pemilih golput karena merasa tidak ada kandidat yang mewakili harapan mereka, tidak percaya pada sistem formal seperti partai dan parlemen, atau menganggap pemilu hanya sebagai alat elite politik tanpa membawa perubahan nyata. Sementara itu, alasan ideologis muncul dari keyakinan yang lebih mendalam, baik dari kelompok yang menolak demokrasi liberal (sayap kiri) maupun

⁹ Syafira Dini Asmarani, Vianka Maulidya Putri, Wilda Dwi Jayanti, 2024, Analisis Perilaku Golput Dikalangan Masyarakat Dan Aspek Hukum Golput Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10 no 11: 816

dari kelompok religius konservatif (sayap kanan) yang menganggap pemilu bertentangan dengan prinsip agama.¹⁰

Perilaku tidak memilih atau *golput* pada penelitian ini adalah perilaku tidak memilih pada Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pemungutan suara ulang memang memiliki kecenderungan tingkat partisipasinya yang rendah, terlepas dari apapun jenis pemilihannya. PSU pemilihan presiden pernah dilakukan pada tahun 2019 di Makassar di mana tingkat partisipasinya menurun secara signifikan dari 64,40% pada pemilu serentak menjadi 45,48% setelah PSU.¹¹ Pada tahun pemilu yang sama, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tingkat partisipasi di seluruh TPS yang melakukan PSU juga mengalami penurunan dengan angka yang sangat variatif. PSU yang dilakukan di DIY didominasi oleh jenis pemilihan presiden serta beberapa PSU untuk pemilihan anggota legislatif DPR RI, DPRD, dan DPD.¹² Penurunan ini menunjukkan bahwa daya tarik elektoral dari suatu jenis pemilihan tidak serta merta membuat pemilih antusias jika harus kembali datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan yang kedua kalinya.

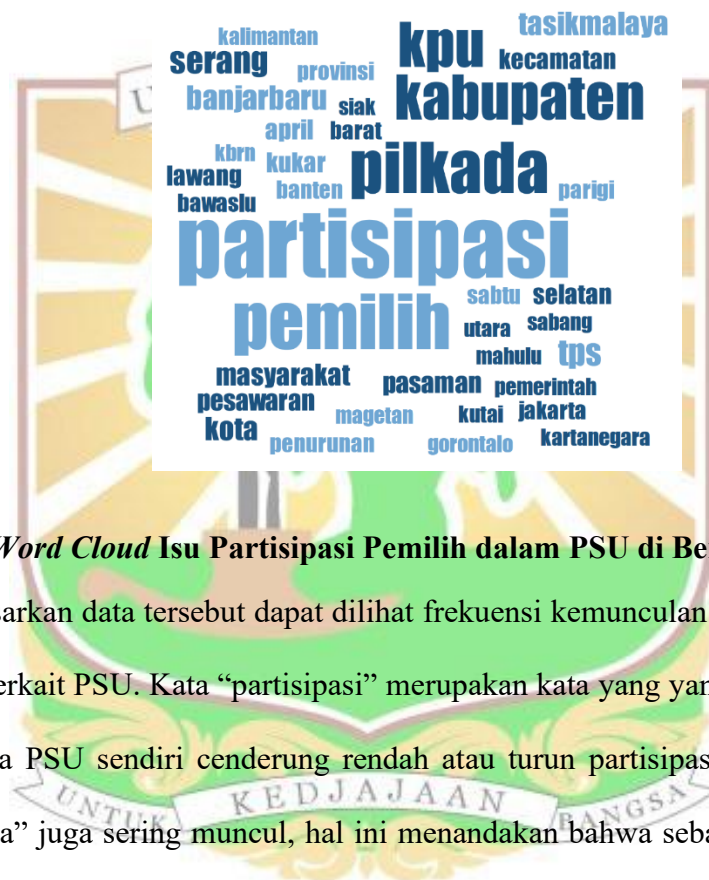
Selanjutnya, pada pemilu tahun 2024, kecenderungan penurunan partisipasi divalidasi melalui pemberitaan media terkait pelaksanaan PSU di berbagai daerah

¹⁰ Efriza, 2012, *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, (Bandung: Alfabeta), 546

¹¹ Gustiana Kambo, 2021, "Refleksi Dari Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kota Makassar Tahun 2019 Untuk Pemilu 2024 Yang Bermartabat," *Jurnal Etika dan Pemilu* 7 no. 2: 78–94

¹² Hamdan Kurniawan, 2020, "Pemungutan Suara Ulang: Menyoal Batas Waktu Dan Faktor Penyebab," *Jurnal KPU*: 1–20.

sepanjang tahun 2024, melalui teknik *crawling* dari Google News menghasilkan 272 artikel berita. Artikel-artikel tersebut kemudian dianalisis secara sederhana menggunakan pendekatan *word cloud* untuk mengidentifikasi kata kunci yang paling dominan dalam pemberitaan.



Gambar 1.1 Word Cloud Isu Partisipasi Pemilih dalam PSU di Berbagai Daerah

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat frekuensi kemunculan kata-kata dalam pemberitaan terkait PSU. Kata “partisipasi” merupakan kata yang paling banyak dibahas karena PSU sendiri cenderung rendah atau turun partisipasinya. Kemudian istilah “pilkada” juga sering muncul, hal ini menandakan bahwa sebagian besar PSU berada pada ranah pemilihan kepala daerah. Kemudian Kata-kata seperti “kabupaten”, “kecamatan”, dan “kota” menandakan bahwa PSU paling sering dilaksanakan pada level administratif ini.

Untuk memperkuat temuan di atas, studi kasus di TPS 4 Kelurahan Kenali Besar, Kota Jambi, pada PSU Pemilu 2024 juga menunjukkan penurunan partisipasi

yang signifikan, di mana jumlah pemilih turun hampir 50%, dari 187 menjadi 97 orang. Penelitian di Jambi tersebut mengidentifikasi beberapa faktor penyebab, antara lain ketidakjelasan informasi mengenai PSU, kebingungan mengenai status pemilih dan perbedaan antara DPT, DPTb, dan DPK, rendahnya pemahaman masyarakat, ketidakpercayaan terhadap proses PSU itu sendiri, sosialisasi yang kurang efektif dari penyelenggara, serta anggapan bahwa hasil PSU tidak akan mengubah hasil akhir pemilu yang mungkin sudah diketahui melalui hitung cepat. Pemilih juga merasa telah dirugikan oleh kesalahan pihak lain yang menyebabkan PSU dan menganggap partisipasi ulang sebagai beban, serta beberapa pemilih sudah memiliki kegiatan lain yang terjadwal atau kehilangan semangat.¹³ Hal serupa juga terjadi pada PSU Pilkada Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pada 16 April 2025. Di salah satu TPS di daerah tersebut, dari sekitar 400 warga dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya sekitar 200 yang menggunakan hak pilihnya. Alasan utama warga untuk tidak memilih adalah karena merasa sudah menyalurkan hak suara mereka sebelumnya pada 27 November 2024.¹⁴

Dalam konteks ini, fenomena Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Provinsi Sumatera Barat menjadi sangat menarik untuk diteliti karena merupakan peristiwa pertama dalam sejarah kepemiluan

¹³ Zakly Hanafi Ahmad, dkk, 2025, Analisis Tingkat Penurunan Partisipasi Pemilih Pada Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Studi Kasus Tps 4 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Jurnal JISIPO 9 no 2: 92

¹⁴ Prayudi, 2025, PSU Pilkada 2024 dan Permasalahannya, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-April-2025-900000619.pdf Diakses pada 2 Juni 2025

Indonesia di mana PSU dilaksanakan secara serentak di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam satu provinsi secara menyeluruh, yang berbeda dari praktik PSU sebelumnya yang umumnya hanya dilakukan secara terbatas pada level TPS tertentu, desa/kelurahan, atau paling luas di tingkat kecamatan atau kabupaten/kota dan secara khusus penelitian ini difokuskan pada Kota Bukittinggi yang menjadi sorotan karena mencatatkan tingkat partisipasi pemilih terendah di Provinsi Sumatera Barat, yakni hanya sebesar 26%.

Penelitian terdahulu yang membahas terkait perilaku tidak memilih telah dilakukan sebelumnya melalui berbagai pendekatan, Riqi Andika melihat faktor tidak memilih pada Pilkada Kabupaten Grobogan pada Tahun 2020 melalui faktor pilihan rasional.¹⁵ Nadia Sri Rahayu melihat perilaku tidak memilih pada Pilkada 2020 di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam melalui faktor kesadaran politik, kepercayaan kepada pemerintah, situasi, dan status sosial ekonomi.¹⁶ Budi Kurniawan melihat perilaku tidak memilih pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bangka Barat melalui faktor kepercayaan politik.¹⁷ Darwin Tarigan melihat perilaku tidak memilih pada Pilwako di Kota Medan melalui faktor status sosial ekonomi, psikologis, sistem politik

¹⁵ Riqi Andika, 2023, "Analisis Perilaku Tidak Memilih (*Non-Voting Behavior*) Pada Pilkada Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Purwodadi)", Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/23474/1/Skripsi_1906016029_Riqi_Andika.pdf

¹⁶ Nadia Sri Rahayu Putri, 2022, "Analisis Rendahnya Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2020 Di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Saat Pandemi Covid-19". Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id/105355/>

¹⁷ Budi Kurniawan, 2019, *Evaluasi Partisipasi Politik Pemilih Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Bangka Barat* (Lampung).

dan pemilu serta kepercayaan politik.¹⁸ Sifahtullah Hamid dkk melihat perilaku tidak memilih pada Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman melalui faktor psikologis, sistem politik, kepercayaan politik, dan faktor sosial ekonomi.¹⁹ Dari beberapa peneliti tersebut, terdapat beberapa faktor yang lumrah digunakan mulai dari faktor individual seperti status sosial ekonomi, psikologis, dan kepercayaan politik hingga faktor yang bersifat makro seperti sistem politik dan pemilu. Pada penelitian ini, peneliti melihat perilaku tidak memilih melalui faktor sumber daya, psikologis, dan ajakan yang merupakan konsep dari *Civic Voluntarism Model* karena belum dibahas pada penelitian sebelumnya, terutama pada faktor sumber daya dan rekrutmen.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut juga peneliti mengidentifikasi perbedaan dari aspek jenis pemilihan. Penelitian sebelumnya melihat perilaku tidak memilih pada pemilihan legislatif atau Pileg dan pemilihan kepala daerah atau Pilkada, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemungutan suara ulang DPD Provinsi Sumatera Barat di Kota Bukittinggi.

¹⁸ Darwin Tarigan, 2018, Perilaku Tidak Memilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015, Universitas Andalas, <http://scholar.unand.ac.id/37519/5/5%20tesis%20utuh.pdf>

¹⁹ Sifahtullah Hamid, dkk, 2024, Penyebab golput pada Pilkada tahun 2020, *Journal of Education, Cultural and Politics* 4 no 4: 866-873

1.2 Rumusan Masalah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu mencatat tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu 2024 di atas 81 persen, melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, yakni 79,5 persen. Angka tersebut memang menyatakan bahwa dalam skala nasional, dalam aspek partisipasi pemilih, pemilu dapat dikatakan berhasil. Namun, peneliti akan mencoba memfokuskan pada salah satu kota di Sumatera Barat yakni di Kota Bukittinggi. Secara rata-rata, KPU Kota Bukittinggi, Sumatera Barat mencatat sebanyak 74 persen warga dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) ikut berpartisipasi memberikan hak suaranya pada Pemilu 2024. Persentase ini memang meningkat dari pemilu sebelumnya pada tahun 2019.²⁰

Angka partisipasi pemilu di Kota Bukittinggi tersebut tidak berlanjut sampai pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Provinsi Sumatera Barat. PSU ini terjadi sebab Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan mantan narapidana korupsi, Irman Gusman yang namanya dicoret dalam daftar calon tetap atau DCT untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MK mempertimbangkan seharusnya Irman Gusman menindaklanjuti putusan PTUN 600/2023, yaitu mencabut keputusan KPU 1563/2023 dan selanjutnya menerbitkan keputusan penetapan pemohon masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota

²⁰ Antara, 2024, Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 Di Bukittinggi Capai 74 Persen,” <https://www.antaranews.com/berita/3999426/partisipasi-pemilih-pemilu-2024-di-bukittinggi-capai-74-persen>. Diakses pada 23 Januari 2025

DPD.²¹ Oleh karena itu melalui putusan nomor 03/03/PHPU.DPD-XXII2024, MK memerintahkan KPU untuk melaksanakan PSU dengan diikuti oleh 16 calon anggota DPD termasuk Irman Gusman.

Secara umum, pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang untuk anggota DPD RI Sumatera Barat menghasilkan partisipasi yang sangat rendah di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hal ini juga dikonfirmasi langsung oleh Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik bahwa rata-rata partisipasi di Sumatera Barat berada di angka 35,71%. Lebih lanjut berikut data tingkat partisipasi PSU DPD Sumatera Barat yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Partisipasi Per Kabupaten/Kota PSU Pasca Putusan MK Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Partisipasi Pemilih
1	Agam	34,26 %
2	Dharmasraya	35,39%
3	Kepulauan Mentawai	45,34%
4	Kota Bukittinggi	25,6%
5	Kota Padang	31,13%
6	Kota Padang Panjang	34,25%
7	Kota Pariaman	41,44%

²¹ Antara, 2024, Masyarakat Sumatera Barat akan lakukan PSU 13 Juli 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4158462/masyarakat-sumatera-barat-akan-lakukan-psu-13-juli-2024>, Diakses pada 23 Januari 2025

8	Kota Sawahlunto	33,79%
9	Kota Solok	29,07%
10	Lima Puluh Kota	41,30%
11	Padang Pariaman	35,74%
12	Pasaman	38,24%
13	Pasaman Barat	35,78%
14	Payakumbuh	31,55%
15	Pesisir Selatan	38,12%
16	Sijunjung	37,49%
17	Solok	37,38%
18	Solok Selatan	32,88%
19	Tanah Datar	37,96%

Sumber: Data Olahan Peneliti

Penurunan tingkat partisipasi ini sangat signifikan apabila dibandingkan dengan partisipasi pada pemilu serentak pada bulan Februari, berikut perbandingannya.

Tabel 1.2
Perbandingan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan DPD Provinsi Sumatera Barat di Kota Bukittinggi Sebelum dan Sesudah Pemungutan Suara Ulang

Sebelum PSU	Setelah PSU
73,96%	25,6%

Sumber: Data Olahan Peneliti

Dilihat lebih spesifik lagi berdasarkan kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi, berikut merupakan rekapitulasi jumlah pengguna hak pilih di Kota Bukittinggi pada PSU DPD Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.3

**Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Kota Bukittinggi pada PSU DPD
Provinsi Sumatera Barat**

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	Jumlah Pengguna Hak pilih
1	Guguak Panjang	33.678	8.325
2	Mandiangan Koto Selayan	41.048	10.342
3	Aur Birugo Tigo Baleh	20.342	5.644
Total		95.068	24.311

Sumber: Data Olahan Peneliti

Penurunan partisipasi PSU di Kota Bukittinggi yang sudah ditunjukkan melalui data-data di atas, sangat bertentangan secara konseptual di mana status sosial ekonomi masyarakat Kota Bukittinggi dapat dikategorikan baik berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Bukittinggi. Status sosial ekonomi yang baik cenderung akan merefleksikan atau mencerminkan tingkat partisipasi yang tinggi. Verba menyatakan bahwa status sosial ekonomi menentukan sebagian besar partisipasi.²² Conway juga mengkonfirmasi bahwa sejumlah penelitian telah mengungkapkan bahwa individu yang mempunyai tingkat pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan yang lebih bagus umumnya lebih berpartisipasi dibanding individu yang

²² Sidney Verba dan Nie, 1972, *Participation in America: Political Democracy and Social Equality*, (New York: Harper and Row)

tidak berpendidikan, berpenghasilan rendah, dan pekerjaan kasar.²³ Berikut merupakan data capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Bukittinggi.

Tabel 1.4
Capaian Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Capaian Tahun 2023
1	Agam	74,44
2	Dharmasraya	73,87
3	Kepulauan Mentawai	65,79
4	Kota Bukittinggi	81,88
5	Kota Padang	83,98
6	Kota Padang Panjang	79,76
7	Kota Pariaman	79,76
8	Kota Sawahlunto	75,91
9	Kota Solok	79,66
10	Lima Puluh Kota	72,05
11	Padang Pariaman	74,54
12	Pasaman	69,85
13	Pasaman Barat	72,03
14	Payakumbuh	80,14
15	Pesisir Selatan	72,24
16	Sijunjung	72,30
17	Solok	71,92
18	Solok Selatan	72,24
19	Tanah Datar	75,57

²³ M Margaret Conway, *op.cit*

20	Provinsi Sumatera Barat	75,64
21	Nasional	74,39

Sumber: Data Olahan Peneliti

Kondisi yang bertentangan ini yang kemudian perlu ada asumsi lain yang menjelaskan mengapa terjadi penurunan partisipasi pemilih. Fenomena rendahnya partisipasi dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Bukittinggi dapat dijelaskan melalui konsep *Civic Voluntarism Model (CVM)*. Secara sederhana, pendekatan ini memandang bahwa partisipasi politik, termasuk dalam bentuk pemberian suara, dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu sumber daya, keterlibatan psikologis, dan ajakan.

Faktor pertama yang menjadi sorotan adalah sumber daya, yang mencakup waktu, uang, dan keterampilan kewarganegaraan. Dalam konteks Kota Bukittinggi, terlihat bahwa masyarakat menghadapi hambatan dari segi waktu untuk berpartisipasi dalam PSU. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan PSU di Kota Bukittinggi bertepatan dengan hari pasar, di mana sebagian besar aktivitas masyarakat terfokus pada kegiatan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih memprioritaskan pekerjaan dan kebutuhan ekonomi mereka dibandingkan dengan berpartisipasi dalam pemungutan suara.²⁴

²⁴ Antara, 2024, KPU Bukittinggi tetapkan hasil perolehan pemungutan suara ulang DPD, <https://www.antaranews.com/berita/4204737/kpu-bukittinggi-tetapkan-hasil-perolehan-pemungutan-suara-ulang-dpd>, Diakses pada 4 Maret 2025

Untuk membuat hambatan waktu menjadi lebih masuk akal, peneliti akan melihat profil pekerjaan masyarakat Kota Bukittinggi. Data menunjukkan bahwa sektor wiraswasta (disebut juga non-formal) sangat mendominasi jenis pekerjaan masyarakat di Kota Bukittinggi.²⁵ Sehingga pada dugaan awal, ketiadaan waktu karena faktor atau motif ekonomi menurut peneliti menjadi masuk akal. Berikut merupakan data kependudukan berdasarkan jenis pekerjaan di kota bukittinggi.

Tabel 1.5
Rekapitulasi Data Kependudukan Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi

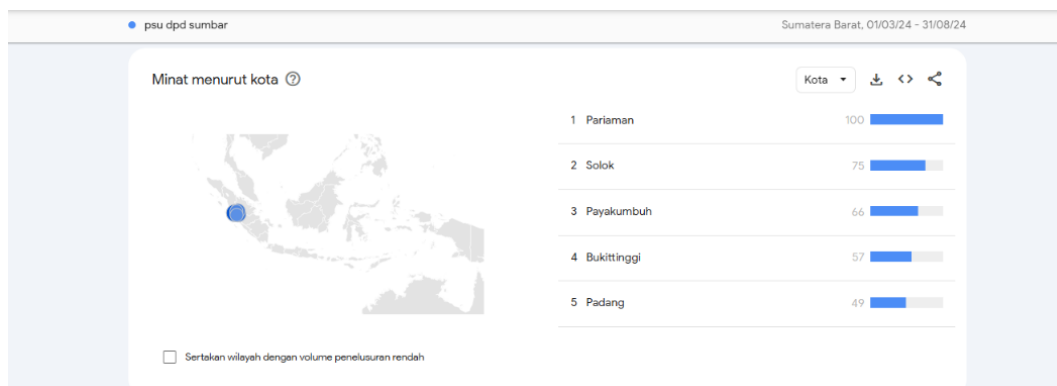
No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Belum/Tidak Bekerja	14,322	13,095	27,417
2	Aparatur/Pejabat Negara	3,122	3,031	6,153
3	Tenaga Pengajar	396	1,477	1,873
4	Wiraswasta	25,419	7,436	32,855
5	Pertanian/Peternakan	893	203	1,096
6	Nelayan	16	2	18
7	Agama Dan Kepercayaan	55	3	58
8	Pelajar/Mahasiswa	15,513	14,373	29,886
9	Tenaga Kesehatan	112	472	584
10	Pensiunan	1,123	906	2,029
11	Lainnya	4	19,617	19,621
12	Jumlah	60,975	60,615	121,590

²⁵ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020, Jenis Pekerjaan Dan JK KOTA BUKITTINGGI, <https://ppid.sumbarprov.go.id/home/details/11063-jenis-pekerjaan-dan-jk-kota-bukittinggi.html>, Diakses pada 26 Januari 2025

Sumber: Data Olahan Peneliti

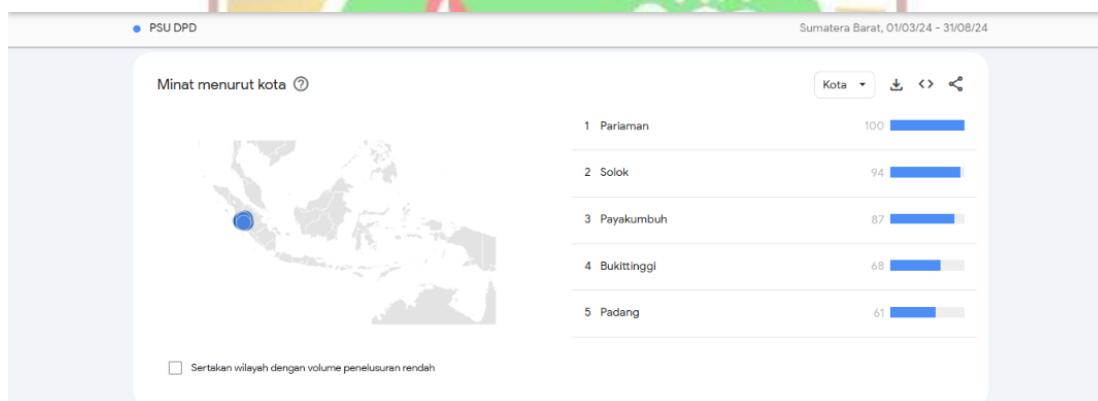
Setelah mengidentifikasi faktor pertama, selanjutnya faktor kedua yang akan dilihat sebagai penyebab rendahnya partisipasi menurut model CVM adalah karena rendahnya keterlibatan psikologis. Keterlibatan psikologis ini mencakup aspek seperti ketertarikan politik, efikasi politik, dan kesadaran politik. Dalam konteks Kota Bukittinggi, terlihat bahwa masyarakat tidak terlalu tertarik untuk berpartisipasi dalam PSU. Hal ini diketahui peneliti dari rendahnya ketertarikan dari masyarakat terhadap pelaksanaan PSU itu sendiri. Rendahnya ketertarikan ini dilihat dari data hasil pencarian *Google Trends* untuk kata kunci "PSU DPD Sumbar" dan "PSU DPD" di Sumatera Barat pada periode 1 Maret - 31 Agustus 2024, terlihat bahwa Kota Bukittinggi memiliki tingkat pencarian yang relatif rendah dibandingkan kota lain seperti Pariaman, Solok, dan Payakumbuh. Dalam pencarian "PSU DPD Sumbar", Kota Bukittinggi hanya mendapatkan skor 57, sementara untuk "PSU DPD", skornya lebih tinggi tetapi tetap lebih rendah dibandingkan kota-kota lain dengan skor 68. Jika menggunakan data *google trends*, perbandingan antar kota ini menurut peneliti lebih relevan mengingat masyarakat urban atau kota memiliki penetrasi *smartphone* yang lebih tinggi.²⁶ Berikut merupakan data pencarian dari kedua kata kunci tersebut pada platform Google Trends.

²⁶ Naomi Adisty, 2022, Mengulik Perkembangan Penggunaan Smartphone di Indonesia, <https://goodstats.id/article/mengulik-perkembangan-penggunaan-smartphone-di-indonesia-sT2LA>, Diakses pada 24 Februari 2025



Gambar 1.2 Minat Berdasarkan Wilayah dari Kata Kunci "PSU DPD Sumbar"

Sumber : Google Trends



Gambar 1.3 Minat Berdasarkan Wilayah dari Kata Kunci "PSU DPD"

Sumber : Google Trends

Rendahnya ketertarikan ini juga dikonfirmasi oleh ketua KPU Kota Bukittinggi menyebutkan bahwa masyarakat kurang antusias untuk ikut serta dalam PSU meskipun pihaknya telah melakukan sosialisasi dengan maksimal.²⁷

²⁷ Altas Maulana, 2024, KPU Bukittinggi Tetapkan Hasil Perolehan Pemungutan Suara Ulang DPD, <https://www.antaranews.com/berita/4204737/kpu-bukittinggi-tetapkan-hasil-perolehan-pemungutan-suara-ulang-dpd>, Diakses pada 26 Januari 2025

Setelah mengidentifikasi faktor kedua, selanjutnya faktor ketiga yang akan dilihat sebagai penyebab rendahnya partisipasi menurut model CVM adalah karena rendahnya ajakan untuk memilih pada PSU DPD Provinsi Sumatera Barat. Peneliti mencoba untuk melihat bagaimana ajakan yang dilakukan antara penyelenggara dan masyarakat. KPU telah secara resmi menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi dengan berbagai cara. Namun, Emma Yohana sebagai salah satu kandidat pada PSU DPD menyatakan hal sebaliknya, menurutnya pihak dari KPU masih kurang melakukan sosialisasi tentang PSU DPD.²⁸ Selanjutnya peneliti melihat bagaimana ajakan berlangsung di antara masyarakat. Dalam hal ini, ajakan antarmasyarakat tampak minim. Hal ini dapat dipahami karena masyarakat Kota Bukittinggi secara umum memiliki latar belakang pekerjaan yang relatif homogen, yakni didominasi oleh sektor non-formal atau wiraswasta, sehingga pada hari-hari sibuk seperti hari pasar, interaksi sosial cenderung berfokus pada aktivitas ekonomi. Selain itu, rendahnya minat terhadap PSU membuat ajakan antarwarga menjadi tidak efektif. Terakhir peneliti mencoba untuk melihat ajakan yang dilakukan antara peserta PSU dengan masyarakat yang mana ajakan ini menurut peneliti cukup mempengaruhi rendahnya partisipasi, sebab untuk PSU DPD ini tidak diperbolehkan adanya kampanye. Berikut merupakan keterangan resmi dari pihak KPU Sumatera Barat terkait dengan kampanye calon DPD Sumatera Barat.

²⁸ JPNN, 2024, PSU DPD RI di Sumbar, Emma Yohana Sebut Partisipasi Pemilih Rendah, <https://m.jpnn.com/news/psu-dpd-ri-di-sumbar-emma-yohana-sebut-partisipasi-pemilih-rendah>, Diakses pada 20 Juni 2025

"*Candidate engagement* antara pemilih dengan calon DPD itu dibandingkan pemilu-pemilu lainnya terkategori rendah. Dan ini seiring dengan intensitas kampanye yang dilakukan pada masa kampanye dahulu. Itu intensitas kampanye DPD itu kurang,"²⁹

Selain itu dari sumber yang berbeda peneliti memperoleh informasi tambahan sebagai berikut.



Gambar 1.4 Berita Pelarangan Kampanye PSU DPD Sumatera Barat

Sumber : Tempo

Peneliti berasumsi bahwa ketiga faktor tersebut, yakni terhambatnya sumber daya, rendahnya keterlibatan psikologis dan minimnya ajakan yang menjadi asumsi yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih masyarakat Kota Bukittinggi

²⁹ Anggi Muliawati, 2024, KPU Ungkap Partisipasi PSU DPD Sumbar Turun: Ada Kebosanan Politik, <https://news.detik.com/pemilu/d-7442788/kpu-ungkap-faktor-partisipasi-psu-dpd-sumbar-turun-ada-kebosanan-politik>, Diakses pada 23 April 2025

pada PSU DPD Provinsi Sumatera Barat di Kota Bukittinggi. Maka dari itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sumber daya terhadap perilaku tidak memilih masyarakat pada PSU DPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana pengaruh keterlibatan psikologis terhadap perilaku tidak memilih masyarakat pada PSU DPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Kota Bukittinggi?
3. Bagaimana pengaruh ajakan terhadap perilaku tidak memilih masyarakat pada PSU DPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Kota Bukittinggi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kajian yang peneliti ambil sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pengaruh sumber daya, keterlibatan psikologis dan ajakan untuk memilih terhadap perilaku tidak memilih masyarakat pada pemilihan suara ulang anggota DPD RI tahun 2024 di Kota Bukittinggi

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu secara akademis dan secara praktis.

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tidak memilih pada pemungutan suara ulang (PSU) DPD Provinsi Sumatera Barat di Kota Bukittinggi Tahun 2024 serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk peneliti selanjutnya yang akan mengambil topik mengenai perilaku tidak memilih

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembaca untuk memperluas wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tidak memilih pada pemungutan suara ulang (PSU) DPD Provinsi Sumatera Barat di Kota Bukittinggi Tahun 2024

